

Polda Jabar Giatkan Ketahanan Pangan, 9 Ribu Hektar Jagung Tertanam

Tasikmalaya. - JABAR.WARTAWAN.ORG

Apr 13, 2026 - 16:37



BANDUNG - Memasuki pertengahan tahun 2026, Polda Jawa Barat mengukuhkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata di lapangan. Hingga 9 April 2026, jajaran kepolisian di wilayah ini telah berhasil menanam jagung seluas 9.147,02 hektar. Capaian ini merupakan buah dari upaya optimalisasi potensi lahan yang tersedia seluas 21.008 hektar di seluruh wilayah hukum Polda Jabar.

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jabar, Kombes Pol

Fadly Samad, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan sebuah gerakan masif yang melibatkan seluruh elemen kepolisian hingga tingkat desa. Ia menekankan pentingnya perluasan area tanam untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga di tengah dinamika global yang kompleks.

"Kami tidak bekerja sendiri. Ini adalah gerakan massal. Hingga hari ini, 9 April 2026, kami sudah menanam di atas 9 ribu hektar, dan ini akan terus kami perluas karena potensi lahan kami masih sangat besar, sekitar 21 ribu hektar lebih," ujar Fadly Samad dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Hasil panen dari ribuan hektar lahan jagung tersebut mulai menunjukkan angka yang menggembirakan. Polda Jabar mencatat, serapan jagung ke gudang Bulog telah mencapai 3.700,13 ton. Angka ini diharapkan terus bertambah seiring dengan rampungnya masa panen di berbagai wilayah.

"Selain disalurkan ke Bulog untuk cadangan pangan pemerintah, sebagian besar hasil panen jagung diserap oleh industri pakan ternak. Tercatat, serapan oleh pabrik pakan mencapai angka signifikan, yaitu 75.066 ton," ucapnya didampingi Kabagbinkar AKBP Condro Sasongko.

Fadly Samad menjelaskan, kolaborasi erat dengan pabrik pakan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani. Hal ini krusial agar para petani merasa aman dan sejahtera dengan hasil panen mereka, sekaligus turut menopang industri peternakan di Jawa Barat.

"Serapan ke pabrik pakan mencapai 75 ribu ton lebih. Ini sangat penting, karena petani tidak perlu khawatir hasil panennya tidak terserap. Harga jagung, kita jaga agar petani tetap sejahtera, sekaligus mendukung industri peternakan di Jawa Barat," jelas Karo SDM.

Untuk mewujudkan program strategis menuju ketahanan pangan berkelanjutan, Polda Jabar menginisiasi skema unik bernama "Keroyok Bareng Rame-Rame". Skema ini memberdayakan seluruh jajaran polres dan polsek melalui program "1 Desa 1 Hektar", yang secara masif mengajak warga desa untuk memanfaatkan setiap lahan kosong yang produktif.

Dalam hal pendanaan, Polda Jabar tidak hanya mengandalkan anggaran internal. Mekanisme pembiayaan program ini bersumber dari tiga pilar utama: Primkoppel (Koperasi Polri), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai mitra perusahaan. Kombes Pol Fadly Samad menilai, kombinasi ini sangat efektif dalam menekan kendala permodalan.

"Jangan tanya soal biaya, karena kami sudah siapkan skema lengkap. Ada KUR untuk petani, ada Primkoppel yang khusus mendampingi anggota dan masyarakat binaan, serta CSR dari perusahaan. Ini membuat petani tidak terbebani modal di awal," terang Karo SDM Polda Jabar.

Pemanfaatan lahan juga menjadi inovasi tersendiri. Polda Jabar menerapkan skema pinjam manfaat dari lahan Perhutani dan PTPN (PTP Nusantara). Hal ini memungkinkan kepolisian dan masyarakat untuk menggarap lahan hutan produksi maupun perkebunan milik BUMN yang sebelumnya tidak produktif,

untuk ditanami jagung secara legal dan terstruktur.

Antusiasme petani dalam mengakses permodalan menunjukkan respon positif. Dari total 498 petani yang didaftarkan oleh pihak kepolisian, sebanyak 406 petani berhasil menerima KUR. Kombes Pol Fadly Samad melihat angka ini sebagai indikator kepercayaan perbankan terhadap program ketahanan pangan yang dijalankan Polda Jabar.

"KUR kita dorong maksimal. Dari 498 petani yang kita daftarkan, 406 sudah cair. Ini artinya, perbankan percaya pada sistem kita. Petani kita arahkan, lahan kita siapkan, pasar juga kita jamin. Sisanya yang belum cair, sedang kita kejar proses administrasinya," ujarnya.

Selain skema KUR umum, terdapat pula petani yang mendapatkan pembiayaan khusus melalui Primkoppel. Sebanyak 82 petani telah menerima KUR Primkoppel, sementara 9 petani lainnya menerima KUR dari skema non-Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Fadly Samad menyatakan, keberagaman sumber pendanaan ini bertujuan untuk mengakomodasi petani yang belum memenuhi syarat KUR perbankan konvensional.

"Dengan Primkoppel, kita punya fleksibilitas. Ada 82 petani yang sudah terbantu lewat koperasi kepolisian. Ditambah 9 petani dari skema non-Himbara. Total pendanaan kita cukup variatif. Ini semua, demi memastikan tidak ada petani yang terhambat hanya karena masalah modal," pungkasnya.

Polda Jabar berharap, program "Keroyok Bareng Rame-Rame" ini dapat menjadi model nasional dalam percepatan ketahanan pangan berkelanjutan. Dengan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, BUMN, perbankan, dan masyarakat, target swasembada jagung nasional dinilai akan semakin cepat tercapai.